

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM 2024 DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Roynaldo Samuel Noya

NPP. 32.1007

Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email : roynaldosnoya31@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ani Martini, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (Research Gap): This research is motivated by the low level of public participation in elections in Ambon City and the role of the General Elections Commission (KPU) in increasing participation through political communication strategies. **Purpose:** The objective of this study is to analyze the political communication strategy of the KPU of Ambon City in increasing public participation in elections. **Method:** This research uses a qualitative approach with a descriptive qualitative method. Data were collected through in-depth interviews with 15 informants, consisting of KPU members, PPK, PPS, sub-district heads, sub-district secretaries, village chiefs (raja negeri), village secretaries, and community members, as well as through documentation. Data analysis was conducted based on the indicators of the Political Communication Strategy Theory by Anwar Arifin. **Results:** The political communication strategy of the KPU of Ambon City has not been fully effective due to socio-cultural barriers such as alcohol abuse, political apathy, geographical limitations, and lack of intensive direct communication. The selection of communication methods and media has also not been fully adapted to the conditions of the community, particularly in areas with low digital literacy. However, the strategy is supported by the involvement of community leaders, inter-institutional collaboration, and the use of social media and face-to-face approaches, which remain effective. **Conclusion:** The political communication strategy implemented by the KPU has not been optimal due to several obstacles; however, it is supported by the involvement of local figures, institutional collaboration, media utilization, and face-to-face approaches. To optimize this strategy, it is recommended that the KPU of Ambon City enhance direct communication with vulnerable groups and first-time voters, strengthen regional mapping in campaign implementation, and conduct continuous evaluation to address existing social barriers.

Keywords: Political Communication Strategy, Public Participation, General Elections Commission (KPU), Election

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kota Ambon dalam pemilu dan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui strategi komunikasi politik. **Tujuan:** Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi komunikasi politik KPU Kota Ambon dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 15 informan yang terdiri dari anggota KPU, PPK, PPS, camat, sekcab, raja negeri, sekretaris negeri, dan masyarakat serta dokumentasi. Analisis data dilakukan berdasarkan indikator Teori Strategi Komunikasi Politik menurut Anwar Arifin. **Hasil/Temuan:** Strategi komunikasi politik KPU Kota Ambon belum berjalan optimal akibat kendala sosial budaya seperti kebiasaan mabuk, apatisisme politik, keterbatasan geografis, serta komunikasi langsung yang belum intensif. Pemilihan metode dan media komunikasi juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat, khususnya di wilayah dengan literasi digital rendah. Meski begitu, strategi ini didukung oleh keterlibatan tokoh masyarakat, kerja sama lintas lembaga, serta pemanfaatan media sosial dan pendekatan tatap muka yang masih efektif. **Kesimpulan:** Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh KPU belum optimal karena beberapa kendala, namun disisi lain strategi ini didukung dengan keterlibatan tokoh masyarakat, kerja sama lintas lembaga, pemanfaatan media serta pendekatan tatap muka. Guna memaksimalkan strategi komunikasi politik ini, KPU Kota Ambon disarankan untuk meningkatkan komunikasi langsung kepada kelompok rentan dan pemilih pemula, memperkuat pemetaan wilayah dalam pelaksanaan sosialisasi, serta melakukan evaluasi berkelanjutan guna mengatasi hambatan sosial yang ada.

Kata kunci: Strategi Komunikasi Politik, Partisipasi Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilu

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, termasuk pemilihan umum, menjadi elemen kunci keberhasilan demokrasi. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Untuk itu, pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 (Budiyo, 2014). Sebagai salah satu negara demokratis, Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk melaksanakan pemilu sesuai dengan prinsip "Luber Jurdil" (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) (Kirana dkk., 2024). Namun, sebagaimana pemilu akan mencapai tujuannya dengan baik, yaitu menghasilkan pemimpin yang amanah dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, apabila negara yang menyelenggarakan demokrasi memiliki kesiapan substansial untuk menjalankan kehidupan demokratis (Labolo, 2015).

Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, termasuk pemilihan umum, menjadi elemen kunci keberhasilan demokrasi. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam pelaksanaannya, penting untuk menjamin kesetaraan hak, kewenangan, dan tanggung jawab antara individu, kelompok, maupun lembaga secara vertikal, horizontal, dan antarwilayah di seluruh Indonesia (Zulaika dan Fikriana, 2019). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih

adaptif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, seperti melalui model hierarki, kerja sama (*joined-up*), alih daya (*outsourcing*), maupun jejaring (*networked*) (Martini dkk., 2019).

Partisipasi politik mencerminkan keterlibatan warga dalam pemilihan dan pembentukan kebijakan publik. Oleh sebab itu, tingkat partisipasi menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi sekaligus keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2022 menegaskan pentingnya upaya peningkatan partisipasi, terutama di daerah dengan angka partisipasi rendah atau rawan konflik.

Secara nasional, tingkat partisipasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mencapai 81,78%, melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 79,5%. Namun demikian, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,12% dibandingkan dengan Pilpres 2019. Di tingkat provinsi Maluku, partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2019 hanya mencapai 75%, di bawah target nasional sebesar 77,5%. Terdapat ketimpangan antarwilayah di Maluku, di mana Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Buru Selatan mencatat partisipasi tinggi, sementara Kota Ambon masih menunjukkan angka partisipasi yang relatif rendah. Terdapat ketimpangan antarwilayah di Maluku, di mana Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Buru Selatan mencatat partisipasi tinggi, sementara Kota Ambon masih menunjukkan angka partisipasi yang relatif rendah. Ketimpangan ini tidak dapat dilepaskan dari sejumlah persoalan, termasuk pengaruh kekuatan uang dalam pemilu, kurangnya keterhubungan antara kandidat dan kebutuhan lokal, serta rendahnya akses masyarakat terhadap informasi politik yang relevan (Labolo, 2016). Khusus di Kota Ambon, terjadi penurunan partisipasi pemilih dalam berbagai jenis pemilu, terutama di Kecamatan Leitimur Selatan, sebagaimana data berikut:

Tabel 1.1 Perubahan Partisipasi Pemilu 2024 di Kota Ambon

Jenis Pemilihan	Perubahan Partisipasi Kota Ambon (%)	Perubahan Signifikan di Kecamatan
Pilpres 2024	-0,43%	Leitimur Selatan: -5,32%
DPRD Provinsi 2024	-0,67%	Leitimur Selatan: -4,92%
DPRD Kota 2024	-0,45%	Leitimur Selatan: -2,16% Sirimau: +9,5%

Sumber : KPU Kota Ambon, 2024

Berdasarkan data dari KPU Kota Ambon angka partisipasi yang relatif rendah. Khusus di Kota Ambon, terjadi penurunan partisipasi pemilih dalam berbagai jenis pemilu, terutama di Kecamatan Leitimur Selatan. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi politik yang lebih tepat sasaran dari Pemerintah Kota Ambon melalui KPU Kota Ambon, terutama di wilayah yang terus mengalami penurunan partisipasi. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi politik yang lebih tepat sasaran dari Pemerintah Kota Ambon melalui KPU Kota Ambon, terutama di wilayah yang terus mengalami penurunan partisipasi. Hal ini menuntut transformasi strategi komunikasi politik oleh penyelenggara pemilu, agar tidak hanya menyampaikan informasi satu arah, tetapi juga membangun kepercayaan dan mendorong keterlibatan aktif melalui media yang relevan seperti media sosial dan platform digital (Younus dkk., 2025).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan elemen esensial dalam keberlangsungan demokrasi. Meskipun sejumlah penelitian telah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di tingkat nasional maupun regional, terdapat kekurangan kajian yang secara khusus menelaah dinamika partisipasi pemilih di tingkat kota, khususnya di Kota Ambon. Meskipun partisipasi nasional pada Pilpres 2024 mencapai 81,78% dan melampaui target RPJMN, secara nasional terjadi penurunan 0,12% dibanding 2019. Di Maluku, partisipasi Pilkada 2019 hanya 75%, di bawah target nasional. Kota Ambon sendiri menunjukkan tren penurunan partisipasi, menjadikannya wilayah dengan tingkat partisipasi relatif rendah pada Pemilu 2024. Data partisipasi pemilu di Kota Ambon menunjukkan penurunan signifikan pada beberapa kecamatan, khususnya Kecamatan Leitimur Selatan, sementara di kecamatan lain seperti Sirimau terjadi peningkatan partisipasi. Fenomena ini menunjukkan adanya disparitas yang perlu menjadi perhatian serius, terutama terkait efektivitas strategi komunikasi politik yang dijalankan oleh KPU di masing-masing wilayah. Efikasi politik yang tinggi diketahui mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, apalagi jika dikemas dengan pendekatan kreatif melalui media sosial (Mulyawan dkk., 2024). Di sisi lain, jejaring sosial kini menjadi ruang politik baru yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi arena persaingan dan pembentukan opini publik yang kompleks (López-López dkk., 2023).

Kesenjangan inilah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu bagaimana strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh KPU Kota Ambon dapat dioptimalkan guna mengatasi disparitas partisipasi pemilih dengan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi lokal yang spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis secara mendalam proses komunikasi politik serta kendala dan peluang yang dihadapi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Dila Novita dan Ai Fitri (2020) berjudul Peningkatan Partisipasi Pemilih Milenial: Strategi Komunikasi dan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu 2019 menggunakan teori Manajemen Strategi dari David (2010) dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Penelitian ini menyoroti strategi KPU Kota Denpasar dalam meningkatkan partisipasi pemilih milenial melalui tahapan pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi, serta evaluasi dan pengendalian (Novita & Fitri, 2020). Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada peningkatan partisipasi pemilih, sementara perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, yakni penulis menggunakan teori Strategi Komunikasi Politik Anwar Arifin (2011).

Penelitian oleh Godeliva Putri Dea Harianja dkk. (2024) berjudul Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 menggunakan teori Manajemen Strategi dari Wheelen, Hunger, Hoffman, dan Bamford (2015), serta metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa strategi KPU Kota Denpasar dilakukan melalui empat tahap, mirip dengan temuan penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan, sedangkan perbedaannya terletak pada kerangka teori yang digunakan (Harianja dkk, 2024).

Penelitian oleh Alfian Muhazir dkk. (2023) berjudul Strategi Komunikasi Politik KPU Kabupaten Banyumas Meningkatkan Peran Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 menggunakan teori Komunikasi Politik dari Dan Nimmo dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik berbasis media sosial efektif meningkatkan

peran sosialisasi. Persamaan terletak pada objek kajian yakni strategi komunikasi politik KPU, sementara perbedaannya pada pendekatan teoritis (Muhazir dkk, 2023).

Penelitian oleh Eugenia Fernanda Gracella dkk. (2024) berjudul Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Usia Produktif pada Pemilu Serentak Tahun 2024 menggunakan teori strategi dari Geoff Mulgan (2008) dan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini secara khusus menyoroti strategi KPU terhadap kelompok usia produktif dan menunjukkan peningkatan partisipasi politik dibanding Pemilu 2019. Persamaan terletak pada lembaga yang diteliti, yakni KPU, sedangkan perbedaannya mencakup teori dan segmentasi sasaran (Gracella dkk, 2024).

Penelitian oleh Rifqi Aulia dan Milka (2024) berjudul Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Z pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 menggunakan teori analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa strategi komunikasi yang digunakan KPU telah memenuhi unsur komunikasi, namun respons dari generasi Z masih beragam. Kesamaan dengan penelitian ini adalah pendekatan metodologis, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus teori dan segmentasi sasaran (Aulia & Milka, 2024).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada konteks, teori, metode, dan indikator analisis yang digunakan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya membahas strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah-wilayah seperti Denpasar, Badung, Banyumas, dan Palangka Raya dengan fokus pada segmentasi usia tertentu atau menggunakan teori manajemen strategi maupun SWOT, penelitian ini secara khusus mengkaji strategi komunikasi politik KPU Kota Ambon dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara umum, dengan menekankan peran komunikasi politik sebagai strategi utama.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori Strategi Komunikasi Politik dari Anwar Arifin (2011), belum digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang dominan menggunakan teori manajemen strategi ataupun komunikasi politik secara umum.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung oleh data primer melalui wawancara dari berbagai level pelaksana pemilu (KPU, PPK, PPS, hingga tokoh masyarakat dan warga) di Kota Ambon, yang memberikan gambaran lebih menyeluruh tentang strategi dan tantangan yang dihadapi dalam konteks lokal yang unik.

Indikator analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga memiliki perbedaan signifikan, yaitu dengan mengacu pada delapan indikator strategi komunikasi politik menurut Anwar Arifin, yakni: Merawat Ketokohan, Memantapkan Kelembagaan, Memahami Khalayak, Menyusun Pesan Persuasif, Menetapkan Metode, Memilih dan Memilah Media, Seni Berkompromi, dan Bersedia Membuka Diri. Indikator ini tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang lebih tajam dalam mengkaji strategi komunikasi politik penyelenggara pemilu.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan strategi komunikasi politik Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Ambon.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali informasi kontekstual dan naratif dari para informan melalui pengamatan langsung dan wawancara (Creswell, 2022). Wawancara mendalam memungkinkan penulis untuk "memasuki perspektif orang lain" dan memahami bagaimana mereka memaknai suatu fenomena (Patton, 2022).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Bogdan mengatakan bahwa hasil yang diperoleh dalam observasi dan wawancara lebih dapat diandalkan jika didukung oleh foto yang ada dan artikel akademis dan teknis (Sugiyono, 2019). Wawancara dilakukan terhadap delapan orang informan yang berasal dari berbagai unsur yang relevan dengan pelaksanaan pemilu. Para informan tersebut meliputi satu orang anggota Sekretariat KPU Kota Ambon (Perancang Teknis dan Bahan Partisipasi Masyarakat), dua orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tiga orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), dua orang camat, satu orang sekretaris camat, satu orang Raja Negeri, dua orang sekretaris Negeri, serta empat orang warga masyarakat Kota Ambon. Seluruh informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap proses pemilu dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan teori Strategi Komunikasi Politik yang dikemukakan oleh Anwar Arifin (2011). Teori ini digunakan sebagai pisau analisis utama karena menyediakan delapan indikator strategis, yaitu: Merawat Ketokohan, Memantapkan Kelembagaan, Memahami Khalayak, Menyusun Pesan Persuasif, Menetapkan Metode, Memilih dan Memilah Media, Seni Berkompromi, dan Bersedia Membuka Diri. Selain wawancara, analisis dokumen juga digunakan sebagai metode untuk menelaah dokumen resmi KPU, peraturan perundang-undangan, serta konten media sosial terkait penyelenggaraan pemilu. Analisis dokumen dilakukan secara sistematis guna memperkaya dan memverifikasi temuan lapangan. Analisis dokumen merupakan suatu prosedur yang dilakukan secara sistematis untuk menelaah atau menilai isi dokumen, baik yang berbentuk cetak maupun dalam format digital seperti dokumen berbasis komputer atau yang disebarluaskan melalui internet (Bowen, 2009).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, peneliti juga melakukan triangulasi sumber, yakni membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen terkait (Miles dkk, 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Komunikasi Politik Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum 2024 Di Kota Ambon

3.1.1 Merawat Ketokohan dan Memantapkan Kelembagaan

3.1.1.1 Merawat Ketokohan

Strategi merawat ketokohan oleh KPU Kota Ambon diwujudkan melalui kolaborasi dengan tokoh-tokoh berpengaruh seperti tokoh agama, adat, kepala desa, lurah, dan aparat kecamatan, serta penyelenggara pemilu seperti PPK, PPS, dan KPPS. Tokoh-tokoh ini dianggap memiliki kredibilitas dan kedekatan emosional dengan masyarakat, sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan

pemilu. Ketokohan juga dimanfaatkan di wilayah sulit dijangkau seperti Leitimur Selatan. Namun, pelibatan mereka masih bersifat sementara dan lebih aktif menjelang pemilu. Oleh karena itu, keberlanjutan strategi ini perlu diperkuat agar dampaknya tidak bersifat musiman. Strategi ini terbukti mampu membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

3.1.1.2 Memantapkan Kelembagaan

Pemantapan kelembagaan menjadi strategi utama KPU Kota Ambon dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penguatan struktur internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai. KPU tidak hanya fokus pada pengelolaan teknis pemilu, tetapi juga menjalin koordinasi dan kerja sama intensif dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal, seperti camat, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial, guna memperluas jaringan komunikasi dan membangun legitimasi sosial kelembagaan. Pendekatan ini memperkuat kredibilitas KPU sebagai institusi yang profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik meningkat dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

3.1.2 Menciptakan Kebersamaan

3.1.2.1 Memahami Khalayak

Memahami khalayak merupakan langkah awal yang sangat penting dalam strategi komunikasi politik KPU Kota Ambon agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. KPU menyesuaikan strategi komunikasinya berdasarkan karakteristik, kebutuhan, serta segmentasi audiens, seperti pemilih muda, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas. Melalui program seperti "KPU Goes to School" dan "KPU Goes to Campus," serta pendekatan khusus pada kelompok tertentu, KPU berusaha menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara efektif. Selain itu, KPU juga memantau respons masyarakat, termasuk fenomena golput, untuk menyesuaikan strategi komunikasi agar lebih tepat sasaran.

Namun, KPU menghadapi sejumlah tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti kendala geografis dan ekonomi yang menyebabkan akses ke TPS sulit dan biaya transportasi tinggi. Faktor psikologis dan persepsi negatif terhadap pemilu juga menjadi penghambat, di mana sebagian masyarakat merasa hasil pemilu tidak berdampak pada kehidupan mereka. Oleh karena itu, selain memberikan informasi, KPU perlu mengembangkan komunikasi yang persuasif agar dapat mengubah sikap masyarakat dan meningkatkan kesadaran pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Dengan memahami khalayak secara menyeluruh, KPU dapat merumuskan strategi komunikasi politik yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi aktif pemilih di Kota Ambon.

3.1.2.2 Menyusun Pesan Persuasif

Pesan-pesan yang disusun disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan khalayak, menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. KPU aktif turun langsung ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, dan menggandeng tokoh masyarakat serta aparat terkait untuk menyampaikan pesan yang bersifat edukatif sekaligus memotivasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan bertanggung jawab. Pesan persuasif juga menekankan pentingnya pemilu sebagai pesta demokrasi yang menggambarkan kebahagiaan dan partisipasi aktif warga tanpa mengarahkan pilihan kepada calon tertentu, sehingga komunikasi tetap netral dan objektif.

Selain itu, KPU menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih akibat faktor geografis, ekonomi, serta persepsi masyarakat yang kadang merasa suaranya tidak berdampak. Oleh karena itu, edukasi pemilu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sejak jauh hari sebelum hari pemungutan suara, dengan tujuan membangun kesadaran dan sikap kritis terhadap pentingnya memilih serta menolak politik uang. Interaksi langsung dengan masyarakat memungkinkan KPU memperoleh informasi tentang tingkat pemahaman dan kebutuhan komunikasi, sehingga strategi pesan dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Penggunaan bahasa yang sederhana dan pendekatan dialogis membantu memastikan pesan dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan, termasuk pemilih pemula dan kelompok rentan, demi tercapainya partisipasi pemilih yang optimal dalam proses demokrasi.

3.1.2.3 Menetapkan Metode

KPU Kota Ambon menerapkan berbagai metode komunikasi politik, terutama metode pengulangan (redundancy), canalizing, dan informative, untuk meningkatkan efektivitas penyampaian pesan pemilu. Metode pengulangan memastikan pesan disampaikan berkali-kali melalui berbagai media sehingga mudah diingat dan dipahami masyarakat. Metode canalizing melibatkan tokoh masyarakat dan figur berpengaruh untuk membangun kepercayaan dan mengarahkan opini publik secara positif. Sementara itu, metode informative memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai pemilu agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, memahami hak dan kewajibannya. Kombinasi metode ini memperkuat kesadaran, membangun kepercayaan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi di Kota Ambon.

Metode persuasif menjadi pilar utama dalam strategi komunikasi politik KPU Kota Ambon dengan pendekatan yang dialogis, inklusif, dan melibatkan tokoh masyarakat untuk memperkuat pesan dan meningkatkan partisipasi. Metode edukatif berperan penting dalam meningkatkan literasi politik melalui penyampaian pesan sederhana dan pelatihan yang menjangkau pemilih pemula dan wilayah terpencil, sehingga mendorong partisipasi berkualitas dan pemilih yang cerdas. Sementara itu, metode koersif diartikan sebagai kontrol sosial yang mendorong kepatuhan lewat transparansi dan keterbukaan, bukan pemaksaan, dan dikombinasikan dengan metode lain secara proporsional. Keseluruhan strategi ini menghasilkan komunikasi politik yang efektif, etis, dan menghargai kebebasan politik masyarakat.

3.1.2.4 Memilah dan Memilih Media

Pemilahan dan pemilihan media oleh KPU Kota Ambon mencerminkan strategi komunikasi yang adaptif terhadap keragaman karakteristik masyarakat. Dengan memadukan media konvensional dan digital, serta menggandeng berbagai pihak hingga tingkat lokal, KPU berhasil memperluas jangkauan informasi dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Langkah ini membuktikan bahwa media bukan sekadar alat penyampai pesan, tetapi juga instrumen penting dalam memperkuat demokrasi.

3.1.3 Membangun Konsensus

3.1.3.1 Seni Berkompromi

Seni berkompromi dalam strategi komunikasi politik KPU Kota Ambon merupakan kunci penting dalam membangun konsensus yang efektif, di mana KPU tidak langsung berkomunikasi dengan masyarakat luas tetapi menjalin kerja sama strategis dengan tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan lembaga lokal sebagai perwakilan masyarakat. Proses kompromi ini tidak hanya

sekadar menyepakati keputusan, melainkan juga mencakup keterbukaan, fleksibilitas, serta kemampuan menyesuaikan metode dan waktu sosialisasi sesuai kondisi di lapangan. Dengan melibatkan berbagai stakeholder dan mekanisme koordinasi berjenjang antara PPS, PPK, camat, dan pihak eksternal seperti Bawaslu serta organisasi sosial keagamaan, KPU mampu mengatasi konflik dan kendala secara kolektif melalui dialog yang partisipatif. Pendekatan ini tidak hanya menjaga stabilitas komunikasi politik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu sehingga mendorong partisipasi yang lebih inklusif dan demokratis.

3.1.3.2 Bersedia Membuka Diri

Keterbukaan bukan hanya menjadi strategi teknis, tetapi juga merupakan bentuk komitmen etis dari KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam membangun kepercayaan publik. Sikap ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang terbuka adalah fondasi penting bagi terciptanya konsensus, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Selain itu, keterbukaan KPU juga mencerminkan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi dinamika sosial politik, sehingga memperkuat legitimasi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu.

3.2 Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Strategi Komunikasi Politik Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum 2024 Di Kota Ambon

3.2.1 Faktor Pendukung Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu

Faktor pendukung keberhasilan strategi komunikasi politik KPU Kota Ambon dalam meningkatkan partisipasi masyarakat:

1. Keterlibatan Tokoh Masyarakat, Lembaga Adat, dan Institusi Keagamaan

Tokoh-tokoh ini menjadi penyambung lidah yang dipercaya komunitasnya, sehingga pesan pemilu lebih mudah diterima dan menjangkau masyarakat akar rumput. KPU melibatkan tokoh informal dan formal dalam komunikasi yang efektif.

2. Kerja Sama Lintas Lembaga Pemerintahan

KPU membangun sinergi dengan pemerintah desa, kecamatan, organisasi kepemudaan, dan lembaga keagamaan melalui forum koordinasi dan rapat rutin untuk menyukseskan pemilu secara bersama-sama.

3. Pemanfaatan Media Sosial dan Saluran Komunikasi Multi-Kanal

Penggunaan media sosial (Instagram, Facebook, YouTube), baliho, dan media lain memungkinkan informasi pemilu tersebar luas dan transparan, menjangkau berbagai kelompok masyarakat secara real-time.

4. Efektivitas Kinerja PPK dan PPS

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) aktif sebagai penghubung informasi di tingkat kecamatan dan desa, didukung pelatihan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara demi proses pemilu yang baik.

5. Pendekatan Tatap Muka oleh Penyelenggara

Komunikasi langsung melalui petugas pemilu dan aparat pemerintahan meningkatkan kepercayaan dan pemahaman masyarakat, khususnya yang kurang terjangkau media digital. Pendekatan ini terstruktur dan sistematis hingga tingkat lokal, memastikan informasi tersampaikan dan terpantau dengan baik.

3.2.2 Faktor Penghambat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu

Faktor penghambat yang dihadapi KPU Kota Ambon meliputi perilaku masyarakat yang menghalangi partisipasi, kondisi geografis yang sulit diakses, serta sikap apatis terhadap proses politik. Untuk itu, penting bagi KPU untuk terus mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui strategi komunikasi yang lebih adaptif dan kontekstual, serta memperhatikan faktor sosial dan geografis masyarakat. Upaya-upaya ini akan memperkuat efektivitas komunikasi politik dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu di masa mendatang.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik KPU Kota Ambon dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu memberdayakan pendekatan yang bersifat partisipatif, membangun hubungan sosial secara langsung melalui tokoh, serta menekankan keterbukaan informasi dan komunikasi dua arah masyarakat. Strategi ini menampilkan bahwa KPU tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi fasilitator dialog dengan masyarakat. Hal ini berbeda dengan temuan Dila Novita dan Ai Fitri (2020) yang tekanan pada tahapan manajemen strategi secara linier, yakni pemindaian lingkungan, penelitian, implementasi, dan evaluasi. Dalam penelitian mereka, strategi lebih bersifat struktural dan prosedural dibandingkan partisipatif dan komunikatif.

Sama halnya dengan temuan Godeliva Putri Dea Harianja dkk. (2024), penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas lembaga, seperti antara KPU dan pemerintah daerah. Namun pendekatan di Kota Ambon lebih kuat dalam memanfaatkan jaringan sosial berbasis lokal seperti tokoh agama, RT/RW, dan lurah sebagai jembatan komunikasi. Di sisi lain, Godeliva dan rekan-rekannya lebih menekankan aspek kelembagaan formal dalam strategi KPU Kota Denpasar. Dengan demikian, temuan ini memperkuat hasil Godeliva dkk. (2024) dalam hal urgensi kolaborasi, tetapi memperluas dengan menunjukkan efektivitas komunikasi berbasis budaya dan komunitas.

Selain itu, temuan dalam penelitian ini memiliki kedekatan konteks dengan penelitian Alfian Muhazir dkk. (2023) yang juga membahas strategi komunikasi politik oleh KPU. Akan tetapi, berbeda dengan temuan Alfian dkk. (2023) yang menyatakan bahwa penggunaan media sosial menjadi instrumen utama dalam strategi komunikasi KPU Kabupaten Banyumas, penelitian ini menemukan bahwa media sosial bukan satu-satunya pendekatan utama. KPU Kota Ambon justru lebih banyak menggunakan pendekatan langsung dan interpersonal karena mempertimbangkan kondisi geografis dan tingkat literasi digital yang beragam di masyarakat. Dalam hal ini, temuan penelitian ini menolak anggapan bahwa media sosial adalah alat komunikasi paling efektif dalam semua konteks geografis dan demografi.

Lebih lanjut, penelitian Eugenia Fernanda Gracella dkk. (2024) mengungkapkan keberhasilan strategi KPU Kabupaten Badung yang berfokus pada pemilih usia produktif. Pendekatan segmentatif

ini memang sesuai dengan wilayah perkotaan yang padat dan homogen. Berbeda dengan temuan Eugenia dkk. (2024), strategi KPU Kota Ambon bersifat menyeluruh dan inklusif, menjangkau semua kelompok usia tanpa membatasi pada satu segmen tertentu. Dengan demikian, temuan ini melengkapi hasil penelitian Eugenia dkk. (2024) dengan menunjukkan pentingnya penyesuaian strategi komunikasi berdasarkan karakteristik sosial-budaya lokal.

Selain itu, temuan penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan temuan Rifqi Aulia dan Milka (2024) yang menggunakan pendekatan analisis SWOT dalam melihat strategi komunikasi KPU Kota Palangka Raya kepada generasi Z. Mereka menyimpulkan bahwa komunikasi kepada generasi muda masih menghadapi hambatan berupa apatisme politik. Sementara itu, di Kota Ambon, strategi komunikasi yang memanfaatkan peran serta tokoh masyarakat dan pendekatan personal ternyata berhasil menjangkau kelompok muda secara tidak langsung melalui pengaruh komunitas dan keluarga. Dengan demikian, temuan ini memperkuat anggapan bahwa komunikasi politik tidak hanya perlu berbasis konten, tetapi juga berbasis jejaring sosial.

Secara keseluruhan, temuan dalam penelitian ini memperkaya literatur tentang strategi komunikasi politik KPU dengan menegaskan bahwa konteks lokal sangat menentukan efektivitas komunikasi. Pendekatan berbasis hubungan sosial dan kepercayaan, yang tercermin dalam metode door to door, dialog terbuka, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan perangkat desa, terbukti lebih efektif di Kota Ambon dibandingkan pendekatan berbasis media digital semata. Hal ini menunjukkan bahwa teori Strategi Komunikasi Politik yang dikemukakan oleh Anwar Arifin (2011), yang menekankan pentingnya memahami khalayak, menyusun pesan persuasif, memilih media yang tepat, dan bersedia membuka diri, relevan dan aplikatif dalam konteks daerah yang memiliki karakter sosial yang kuat.

Dalam pelaksanaan strategi komunikasi politik KPU Kota Ambon, terdapat sejumlah faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan upaya peningkatan partisipasi pemilih. Pertama, kerja sama lintas sektor antara KPU dan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi modal sosial yang penting. Hal ini terlihat jelas di Kecamatan Sirimau, di mana koordinasi yang intens antara KPU dan pemerintah kecamatan, hingga ke tingkat RT/RW, membantu penyebaran informasi dan pemutakhiran data pemilih secara efektif. Kedua, keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam proses sosialisasi terbukti memperkuat daya jangkauan pesan-pesan KPU, khususnya di wilayah yang cenderung kurang terpapar media digital. Ketiga, komitmen dan kesiapan internal KPU Kota Ambon, termasuk PPK dan PPS, dalam menjalankan strategi komunikasi yang bersifat langsung, partisipatif, dan kontekstual, menjadi kekuatan tersendiri.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi komunikasi politik tersebut. Pertama, tantangan geografis dan aksesibilitas wilayah, terutama di daerah-daerah pesisir dan perbukitan, menyebabkan lambatnya distribusi informasi dan kurangnya intensitas interaksi langsung dengan masyarakat. Kedua, tingkat literasi politik dan digital yang masih rendah di sebagian kelompok masyarakat menghambat efektivitas penggunaan media berani sebagai kanal sosialisasi. Ketiga, sikap apatis sebagian masyarakat terhadap proses politik, baik karena pengalaman negatif di masa lalu maupun karena ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu, menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dalam membangun komunikasi yang persuasif.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi komunikasi politik KPU tidak hanya ditentukan oleh rencana pesan dan media yang digunakan, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan struktural, sosial, dan kultural di tingkat lokal. Oleh karena itu, strategi komunikasi politik

idealnya bersifat adaptif, dengan mempertimbangkan dinamika sosial masyarakat dan kondisi geografis setempat sebagai bagian integral dari perencanaan komunikasi.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu melalui penerapan berbagai strategi komunikasi politik yang adaptif dan kontekstual. Strategi tersebut meliputi pemanfaatan tokoh masyarakat sebagai agen komunikasi, kerja sama lintas lembaga pemerintahan dan stakeholder terkait, serta penggunaan media sosial dan komunikasi multi-kanal untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, khususnya generasi muda. Selain itu, peran PPK dan PPS sebagai pelaksana komunikasi di tingkat lapangan sangat penting dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor pendukung yang memperkuat efektivitas strategi komunikasi politik KPU, seperti adanya sinergi antar lembaga, penggunaan media yang sesuai dengan karakteristik masyarakat, serta pembekalan yang memadai bagi penyelenggara pemilu di tingkat lokal.

Namun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang mengurangi efektivitas komunikasi, antara lain perilaku masyarakat yang mengonsumsi minuman keras pada hari pemungutan suara, kondisi geografis yang sulit dijangkau terutama di daerah terpencil dan berbukit, serta sikap apatis dan rendahnya kesadaran politik sebagian warga. Oleh karena itu, KPU Kota Ambon perlu terus mengembangkan dan menyesuaikan strategi komunikasi politiknya agar mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut, termasuk memperkuat edukasi politik, memperluas akses informasi di wilayah sulit dijangkau, dan meningkatkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang hanya terbatas di Kota Ambon, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk wilayah lain dengan karakteristik berbeda. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya juga membatasi jumlah informan dan data yang dapat dihimpun secara mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*futurework*). Penulis menyarankan agar penelitian lanjutan dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak informan, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi komunikasi politik KPU di berbagai daerah. Penelitian mendatang juga dapat fokus pada pengembangan metode komunikasi yang lebih inovatif untuk mengatasi hambatan geografis dan sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilu.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Pemerintah Kota Ambon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon beserta seluruh jajaran, khususnya para narasumber yang telah memberikan waktu, informasi, dan dukungan selama proses penelitian berlangsung. Terima kasih juga penulis haturkan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa, ucapan terima kasih kepada keluarga, teman-teman, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil selama penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2011). *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aulia, R., & Milka. (2024). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Z Pada Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024*. KAGANGA KOMUNIKA: Journal of Communication Science, 6(1), 11–24. <https://doi.org/10.36761/kagangakomunika.v6i1.3551>
- Bowen, G. A. (2009). *Document analysis as a qualitative research method*. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Budiyono, B. (2013). Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3). <https://scholar.archive.org/work/ziesdb5tcrdizfmwcy42ba3c6i/access/wayback/http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/387/344>
- Creswell, J. W. (2022). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage publications. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Qualitative+Inquiry+And+Research+Design:+Choosing+Among+Five+Approaches.+Sage+publications.&ots=ir87fJUSz&sig=yqDwkGGYGP8STBPudCwyc4HFqGY&redir_esc=y#v=onepage&q=Qualitative%20Inquiry%20And%20Research%20Design%3A%20Choosing%20Among%20Five%20Approaches.%20Sage%20publications.&f=false
- Gracella, D., Susilo, A., & Hafidz, I. (2024). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Usia Produktif pada Pemilu Serentak Tahun 2024 (Studi kasus : Kecamatan Kuta Selatan)*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 87-108. <https://doi.org/10.61292/shkr.121>
- Harianja, G. P. D., Yudartha, I. P. D., & Prabawati, N. P. A. (2024). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020*. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(3), 88–89. <https://doi.org/10.61292/shkr.120>
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). *Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil*. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11-26. <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.80>
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep Dan Isu Strategis*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16>
- Labolo, M. (2016). Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2), 1-15. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/2790>
- López-López, P. C., Barredo-Ibáñez, D., & Jaráiz-Gulías, E. (2023). *Research on Digital Political Communication: Electoral Campaigns, Disinformation, and Artificial Intelligence*. *Societies*, 13(5), 126. <https://doi.org/10.3390/soc13050126>
- Martini, A., Thahir, M. I., & Khairi, H. (2019). *Aplikasi Model Organisasi Pada Struktur Organisasi Perangkat Daerah*. *Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 21(2), 200-209. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/454>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage. <https://doi.org/10.1177/1098214014556146>
- Muhazir, A., Miranti, A., & Sayidatina, K. (2023). *Strategi Komunikasi Politik KPU Kabupaten Banyumas Meningkatkan Peran Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024*. *Jurnal PIKMA: Publikasi Media dan Cinema*, 5(2), 176–189. <https://doi.org/10.24076/pikma.v5i2.1029>
- Mulyawan, W., Rifai, R., & Hidayat, R. (2024). *Factors influencing first-time voters' turnout in the 2024 legislative elections: Political efficacy, campaign strategies, and financial incentives*. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 12(2), 157-168. <https://www.ijobsor.pelnus.ac.id/index.php/ijopsor/article/view/266/208>
- Novita, D., & Fitri, A. (2020). *Peningkatan Partisipasi Pemilih Milenial: Strategi Komunikasi Dan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu 2019*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 201-222. <http://dx.doi.org/10.33558/makna.v7i2.2182>
- Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WCG_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Nugroho,+Riant.+\(2009\).+Public+Policy:+Dinamika+Kebijakan,+Analisis+Kebijakan,+Manajemen+Kebijakan.+Jakarta:+Elex+Media+Komputindo.&ots=ilxHEqGJO4&sig=wUCT2ggsThEx_iD0nV9D38ZyKE&redir_esc=y#v=onepage&q=Nugroho%2C%20Riant.%20\(2009\).%20Public%20Policy%3A%20Dinamika%20Kebijakan%2C%20Analisis%20Kebijakan%2C%20Manajemen%20Kebijakan.%20Jakarta%3A%20Elex%20Media%20Komputindo.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WCG_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Nugroho,+Riant.+(2009).+Public+Policy:+Dinamika+Kebijakan,+Analisis+Kebijakan,+Manajemen+Kebijakan.+Jakarta:+Elex+Media+Komputindo.&ots=ilxHEqGJO4&sig=wUCT2ggsThEx_iD0nV9D38ZyKE&redir_esc=y#v=onepage&q=Nugroho%2C%20Riant.%20(2009).%20Public%20Policy%3A%20Dinamika%20Kebijakan%2C%20Analisis%20Kebijakan%2C%20Manajemen%20Kebijakan.%20Jakarta%3A%20Elex%20Media%20Komputindo.&f=false)
- Patton, M. Q. (2022). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage publications. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=FjBw2oi8El4C&oi=fnd&pg=PR21&dq=Patton,+M.+Q.+\(2022\).+Qualitative+Research+%26+Evaluation+Methods.+Sage+publications.&ots=byp5gHLDwM&sig=PMyzFKim0mRCERfrynHJH-hmgGw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=FjBw2oi8El4C&oi=fnd&pg=PR21&dq=Patton,+M.+Q.+(2022).+Qualitative+Research+%26+Evaluation+Methods.+Sage+publications.&ots=byp5gHLDwM&sig=PMyzFKim0mRCERfrynHJH-hmgGw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta https://www.researchgate.net/profile/Hery-Purnomo/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD/links/65a89006bf5b00662e196dde/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D.pdf
- Younus, M., Mutiarin, D., Abdul Manaf, H., Nurmandi, A., & Luhur Prianto, A. (2025). Conceptualizing smart citizen as smart voter and its relationships with smart election process. *Discover Global Society*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.1007/s44282-025-00148-x>
- Zulaika, S., & Fikriana, A. (2023). Peran Hukum Tata Negara; Studi Literature Pada Pemilu di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.75>